

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review.1.(1), 15-24. ISSN: 2614-5030.
- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Anggraini, Rizki. (2017). *Kesadaran Masyarakat dalam AdiministrasiKependudukan (Studi Pengurusan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang Tahun 2015)*.Jurnal Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2017.
- Candra, I Wayan dkk. (2017). *Psikologi Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta :Andi
- Hadi, Sofyan. (2017). *Hukum Positif dan The living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. 13 (26), 259-266.
- Hartono, Dudi. (2016). *Psikologi*. Jakarta Selatan : Pusdik SDM Kesehatan.
- Imaniyarti, Neni Sri dan Adam, Panji. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Poko-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaidi, Adi. (2017). *Optimalisaassi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang administraasi Kependudukan*.Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN. Vol 4 No 4 ,ISSN:0216-2091.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mustari. (2016). *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepoto*. Jurnal Supermasi, XI (1), 1-8, ISSN 1412-517 X.
- Tim Peneliti Pascasarjana UNP. (2017). *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kabupaten Koto Tangah Padang*: Ernawati dkk.
- Peraturan Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Penegakan Administrasi Kependudukan.

- Peraturan Presiden (Perpres) 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Registrasi Penduduk dan Registrasi Pencatatan Sipil.
- Peraturan Pemerintah Indonesia No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Penduduk Dan Persyaratan Dan Prosedur Pendaftaran Warga Negara
- Pieter, H.Z & Lubis. NM (2017) *Pengantar Psikologi Keperawatan*. Jakarta: Kencana.
- Ramli, Tatty Aryani. (2005). *Kepemilikan Pribadi, Perspektif Islam, Kapitalis dan SosialisXXI* (1) Januari-Maret 2005: 01-13.
- Tahir, Heri (2010). *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Thomas Riko (2016). *Persepsi Masyarakat Akan Kualitas Layanan Yang Menjadikan E-KTP di Kabupaten Tulung Selapan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*. Jurnal Administrasi Publik 4 (2), 189-201.
- Salman, Oje, Damian, dan Eddie (2002). *Konsep Hukum Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Saloko, angger. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gerbang pencarian.
- Soemaryani, Imas. Dkk. (2013). *Penerimaan Masyarakat atas Pemberlakuan E-KTP di Kota Bandung (Studi Berbasis Technology Acceptance Model-TAM)*.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim.2010. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung:Sinar Baru Offset.
- Sugiyono (2011). *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT: Rineka Cipta.

Sutanto dkk. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum / PTHI*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Indonesia No. 23 Tahun 2006 Pasal 63 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang amandemen UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wibowo, Setrianto Tri, (2011). *Peran Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga tentang Partisipasi Warga Dan Kepemilikan KTP*. Skripsi.Universita Sebelas Maret. 2011.